

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

ARI SANDY ILMU

0913015019 / FE / EA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Disusun Oleh :

ARI SANDY ILMI

0913015019 / FE / EA

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal : 16 Januari 2014

Pembimbing :

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Ketua

Rina Mustika SE, MM

Dr. Indrawati Y.AK.MM

Sekretaris

Drs. Ec. Saiful Anwar, Msi

Anggota

Rina Mustika SE, MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur

Dr. H. Dhani Ichasanuddin Nur, SE, MM

NIP. 19630924 198903 1001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep)”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu. Rina Mustika SE, MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran. Selain itu juga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin. N, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Dr. Hero Priono, Msi, Ak, selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi ini.
4. Para Dosen pengajar di Program Studi Akuntansi yang telah banyak memberi masukan dalam proses belajar-mengajar.

5. Drs. Ec. Abd. Suud,MM, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di bagian keuangan.
6. Bapak, Ibu dan Teman-teman yang telah memberi doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat menyempurnakan bagi skripsi ini, penulis akan menerima dengan baik.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi, dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Laporan Keuangan Sektor Publik	11
2.2.2. Akuntansi Sektor Publik	14

2.2.3. Pengawasan	19
2.2.4. Kualitas Laporan Keuangan	22
2.3. Kerangka Pikir	25
2.3.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	25
2.3.2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	25
2.3.3. Kerangka Pikir	26
2.4. Hipotesis	26
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	 27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	27
3.3. Populasi dan Penentuan Sampel	32
3.4. Tehnik Pengumpulan Data	33
3.5. Tehnik Analisis dan Uji Hipotesis	33
3.5.1. Evaluasi Goodness-of-fit Outer Model	33
3.5.2. Evaluasi Goodness-of-fit Inner Model	36
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	 37
4.1. Statistik Deskriptif	37
4.1.1. Profil Responden	37
4.1.2. Penilaian Responden	39

4.2. PLS (Partial Least Square)	44
4.2.1. Evaluasi Outer Model	45
4.2.2. Evaluasi Inner Model	49
4.3. Analisis dan Pembahasan	52
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	 56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1. Hasil Pendugaan PLS	45

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.2.	Profil Responden Berdasarkan Usia	38
Tabel 4.3.	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel 4.4.	Kategori Rata- Rata Jawaban Responden	39
Tabel 4.5.	Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik	40
Tabel 4.6.	Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Pengawasan	41
Tabel 4.7.	Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan	43
Tabel 4.8.	Nilai Outer Loading Variabel Variabel Penelitian	46
Tabel 4.9.	Nilai Cross Loading	47
Tabel 4.10.	Hasil Composite Reliability	49
Tabel 4.11.	Nilai R-square Model	49
Tabel 4.12.	Hasil InnerModel	50
Tabel 4.13.	Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	57
Lampiran 2. Rekap Data Kuesioner	60
Lampiran 3. Mean Variabel Penelitian	62
Lampiran 4. Distribusi Frekuensi Penelitian	63
Lampiran 5 Partial Least Square (PLS)	72

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini berarti bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi sektor publik dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik. Pengawasan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep. Kondisi ini berarti bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik. Pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep agar terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, khususnya pada bagian keuangan sehingga dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan atas pembuatan laporan keuangan dan atas penggunaan dana pemerintah di Kabupaten Sumenep perlu untuk terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

The results showed that the application of public sector accounting standards provide a positive and significant impact on the quality of financial statements. This condition means that the better implementations of public sector accounting standards in financial reporting of Sumenep District Government, then the quality of the resulting financial statements are also getting better. The supervision has positive and significant impact on the quality of financial statements of Sumenep District Government. This condition means that the better the surveillance conducted, the quality of the resulting financial statements is also getting better. The influence of supervision on the quality of the financial statements of Sumenep District Government is bigger than the effect of the application of public sector accounting standards.

Suggestions that can be delivered in this study is for Sumenep District Government to continue improving the quality of human resources, particularly in the finance section so as to make financial statements in accordance with public sector accounting standards and oversight of financial reporting and the use of government funds in the of Sumenep District Government need to be improved.

Keywords: Public Sector Accounting Standards, Monitoring, Quality of financial Statements

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar kewenangan pemerintah di dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, salah satunya adalah laporan keuangan. Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang

telah direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak berhenti hanya sampai di situ, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Jenis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam pencatatan laporan keuangan adalah akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi

pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. Purnama (2011) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar 55%. Penelitian lain dilakukan oleh Pamungkas (2012) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara parsial ataupun secara simultan.

Pemerintah daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Letak Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur Pulau Madura merupakan Wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau. Dari empat kabupaten di Madura, Sumenep ini merupakan kabupaten yang mendominasi kekayaan sumber daya alam, terutama dibidang perminyakan. Sumenep ini punya banyak tambang-tambang minyak dan gas (Sumenep.go.id, 2012). Potensi kekayaan alam yang besar ini harus dikelola dengan baik serta hasilnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD selalu wakil rakyat berupa laporan keuangan.

Saat ini kabupaten Sumenep telah memperoleh opini laporan keuangan wajar dengan syarat yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih dianggap belum baik sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah topik pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep ?

2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan dalam rangka menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan dampak pada akuntabilitas kinerja perusahaan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat mengkonfirmasi bahwa:
 - 1) Penerapan akuntansi sektor publik mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan lembaga publik
 - 2) Pengawasan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan lembaga publik
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi perbendaharaan perpustakaan UPN Veteran Surabaya dan kelak berguna bagi dosen dan mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lanjutan serta sebagai bahan pembelajaran.